

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Dewasa ini boleh di katakan tidak ada negara yang aktivitas ekonominya bebas dari campur tangan pemerintah. Kecenderungan tersebut juga terjadi di negara yang perekonomiannya liberal atau kapitalis sekalipun. Dilihat dari sejarah, hal ini merupakan siklus yang terus berputar, pada masa Merkantilisme dimana peran pemerintah cukup dominan dalam perekonomian mengalami kegagalan yang ditandai dengan lahirnya teori Klasik Adam Smith. Kemudian diganti dengan peran swasta yang begitu dominan dalam perekonomian suatu negara. Namun peran swasta tersebut juga menemui kegagalan yang dikenal sebagai kegagalan pasar (*market failure*). Hal ini ditandai dengan adanya depresi besar akibat mekanisme pasar yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya pemerintah diharapkan untuk memainkan peran dalam perekonomian (Mangkusoebroto, 1999).

Dengan kata lain peran pemerintah dalam perekonomian diperlukan, karena Pemerintah memiliki tanggung jawab aktif dalam retribusi pendapatan, baik berupa bantuan publik (*public assistance*), bantuan langsung (*cash*) dan asuransi sosial (*transfer payment*). Dalam perekonomian, pemerintah bukan hanya berperan sebagai produsen, namun juga sebagai konsumen. Pemerintah sebagai produsen tidak hanya menyediakan barang-barang publik, namun juga barang-barang swasta seperti pariwisata, telekomunikasi, transportasi, sedangkan sebagai konsumen, pemerintah merupakan salah satu unit ekonomi yang juga ikut

membeli berbagai barang dan jasa yang dihasilkan oleh swasta, kegiatan ini cukup besar jumlahnya dan penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Aggregate Demand. Kegagalan pasar juga menjadi alasan lain mengapa campur tangan pemerintah dirasa perlu. Mekanisme pasar melalui invisible hand dinilai tidak mampu secara efisien dan efektif dalam menjalankan fungsinya yang menurut Weimer dan Vinibg (1992) adalah kegagalan pasar tradisional. Namun kegagalan pasar hanyalah salah satu sebab mengapa pemerintah harus turun tangan dalam perekonomian agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal (Mangkusoebroto, 1999).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting kinerja ekonomi suatu negara. Dalam hal ini, banyak penelitian dan karya penelitian telah difokuskan pada faktor-faktor dan kebijakan yang dapat membuat potensi sumber pertumbuhan yang efektif. Sebuah studi OECD pada faktor-faktor pertumbuhan ekonomi menekankan bahwa kebijakan tepat sasaran merupakan instrumen penting bagi iklim usaha dan investasi publik, yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Milova, 2011).

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terus menghasilkan serangkaian perdebatan di kalangan ahli ekonomi. Beberapa ekonom berpendapat bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah pada infrastruktur sosial, ekonomi dan fisik mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan output nasional. Demikian pula, pengeluaran untuk infrastruktur seperti jalan, komunikasi, listrik, dll, mengurangi biaya produksi, meningkatkan investasi sektor swasta dan

profitabilitas perusahaan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi (Monday, 2014).

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005) ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumber daya manusia, (2) sumber daya alam, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi. Pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi *social overhead capital (SOC)* yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya. (Suparno, Heri. 2014).

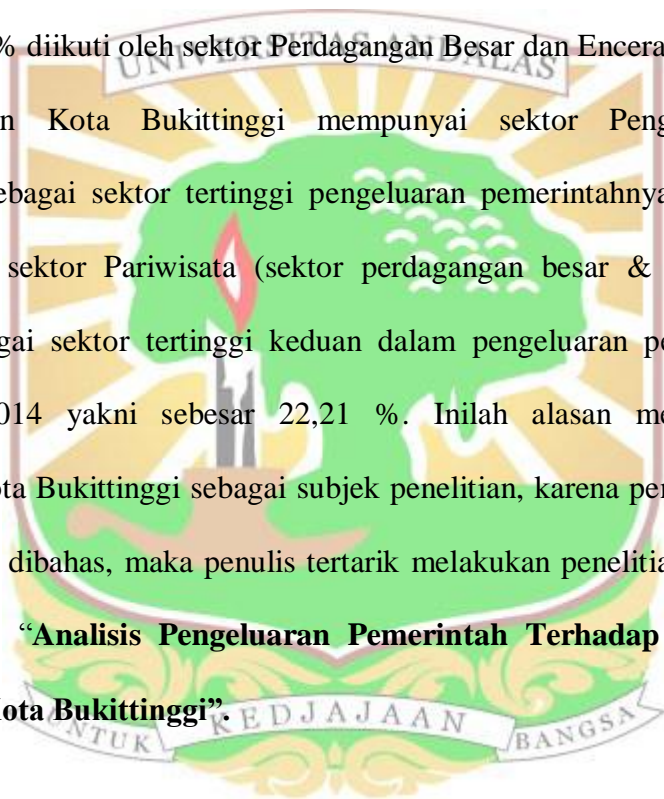
Kota Bukittinggi adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, terletak pada posisi yang strategis yakni berada pada posisi silang lintas ekonomi Barat – Timur dan Utara – Selatan wilayah regional Sumatera, alam yang indah dan topografi wilayah yang pada umumnya bergelombang dan berbukit menjadikan udaranya sejuk dan menyegarkan, memiliki beberapa objek wisata yang mendukung Kota Bukittinggi menjadi salah satu tujuan wisata dan tempat peristirahatan yang terkenal di banding kota/kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat (RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2012).

Dijadikannya sektor pariwisata dan perdagangan sebagai sektor unggulan di Kota Bukittinggi, tentu akan berpengaruh terhadap pembangunan daerah, terutama bagi perekonomian Kota Bukittinggi. Menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2015 tercatat bahwa Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi di tahun

2013 sebesar 11,93 % mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 12,33 %, sedangkan Pengeluaran Pemerintah Kota Bukittinggi setiap tahunnya juga terus mengalami peningkatan. Keterlibatan Pemerintah secara langsung dapat dilihat dari besarnya pengeluaran Pemerintah dalam PDRB. Menurut Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2015 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 pengeluaran pemerintah Kota Bukittinggi mencapai Rp 504.110.000 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 menjadi sebesar Rp 542.032.000. Demikian juga dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukittinggi tahun 2014 secara umum meningkat. Jumlah wisatawan mancanegara mengalami kenaikan 19,64 % dari 26.802 orang menjadi 32.067 orang, wisatawan domestik naik 11,30 % dari 360.191 orang menjadi 404.145 orang. Kota Bukittinggi pada tahun 2014 memiliki hotel yakni sebanyak 63 hotel dengan 16 diantaranya adalah hotel berbintang dan 47 hotel tidak berbintang. Hal ini semakin mengokohkan Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata dan Kota Perdagangan. (Bukittinggi Dalam Angka, 2015).

Sehubungan dengan itu penulis tertarik untuk melihat korelasi antara Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi. Campur tangan pemerintah di Kota Bukittinggi merupakan hal yang penting untuk mendorong sarana dan prasarana yang mendukung, terutama pada sektor pariwisata dan perdagangan di kota tersebut. Jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya yang ada di Sumatera Barat, seperti Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2014, pengeluaran pemerintahnya di sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 26,73 % diikuti oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 21,14 %, selanjutnya Kota Padang dengan sektor Perdagangan

Besar dan Eceran sebagai sektor paling tinggi dalam pengeluaran pemerintahnya sebesar 17,25 % diikuti dengan sektor Industri Pengolahan sebesar 16,55 %, selanjutnya Kota Dharmasraya dengan sektor Pertanian menjadi sektor penyumbang tertinggi pengeluaran pemerintahnya sebesar 30,80 % diikuti dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 12,68 % , selanjutnya jika dibandingkan dengan Kepulauan Mentawai yang juga bagian dari Sumatera Barat, ternyata sektor Pertanian merupakan sektor pengeluaran pemerintahnya tertinggi sebesar 50,47 % diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 12,17 % . Sedangkan Kota Bukittinggi mempunyai sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebagai sektor tertinggi pengeluaran pemerintahnya yakni sebesar 25,18 % dan sektor Pariwisata (sektor perdagangan besar & eceran, hotel, restoran) sebagai sektor tertinggi kedua dalam pengeluaran pemerintah Kota Bukittinggi 2014 yakni sebesar 22,21 % . Inilah alasan mengapa penulis mengambil Kota Bukittinggi sebagai subjek penelitian, karena penulis merasa ini menarik untuk dibahas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk skripsi dengan judul **“Analisis Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bukittinggi”**.



## 1.2. Perumusan masalah

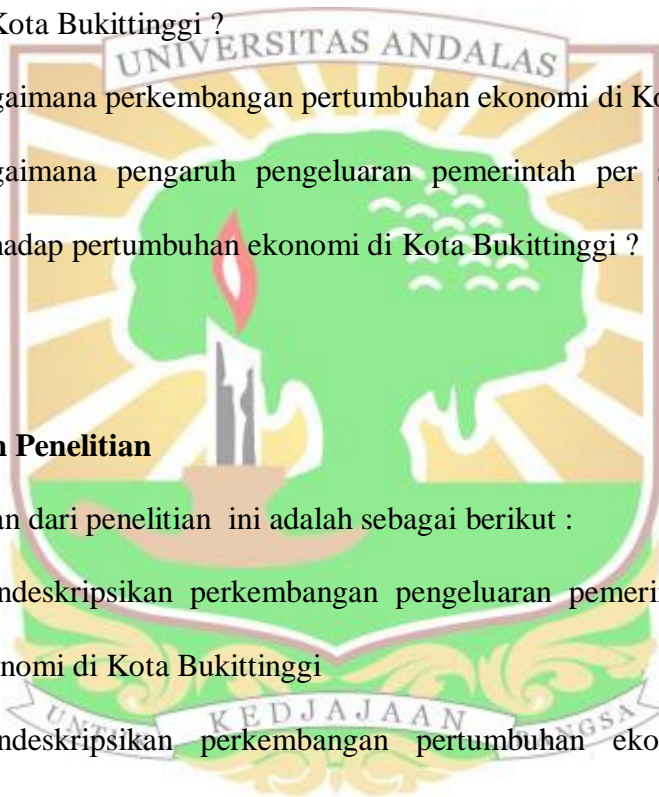
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka ada rumusan masalah yang dapat diambil sebagai kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Perumusan masalah diperlukan sebagai suatu cara untuk mengambil keputusan dari penulisan skripsi ini :

1. Bagaimana perkembangan pengeluaran pemerintah per sektor ekonomi di Kota Bukittinggi ?
2. Bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah per sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan perkembangan pengeluaran pemerintah per sektor ekonomi di Kota Bukittinggi
2. Mendeskripsikan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi
3. Meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah per sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi



#### 1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi dan sehingga dapat digunakan sebagai ilmu dan pengetahuan juga bisa digunakan oleh :

1. Mahasiswa fakultas ekonomi terutama departemen ekonomi yang ingin melanjutkan penelitian selanjutnya sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan
2. Kalangan akademisi dan peneliti yang tertarik untuk membahas mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan yang terbaik untuk gambaran tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi

#### 1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Agar dalam pembahasan dalam penganalisaan nantinya lebih terarah, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup penulisan proposal ini, yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan di Kota Bukittinggi
2. Penelitian dilakukan untuk melihat apakah Pengeluaran Pemerintah benar ada pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah per sektor ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bukittinggi
4. Penelitian ini tidak membahas dan tidak menganalisa bagaimana proses terjadinya Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi namun walau bagaimanapun hal-hal tersebut disinggung dalam porsi yang sangat kecil.

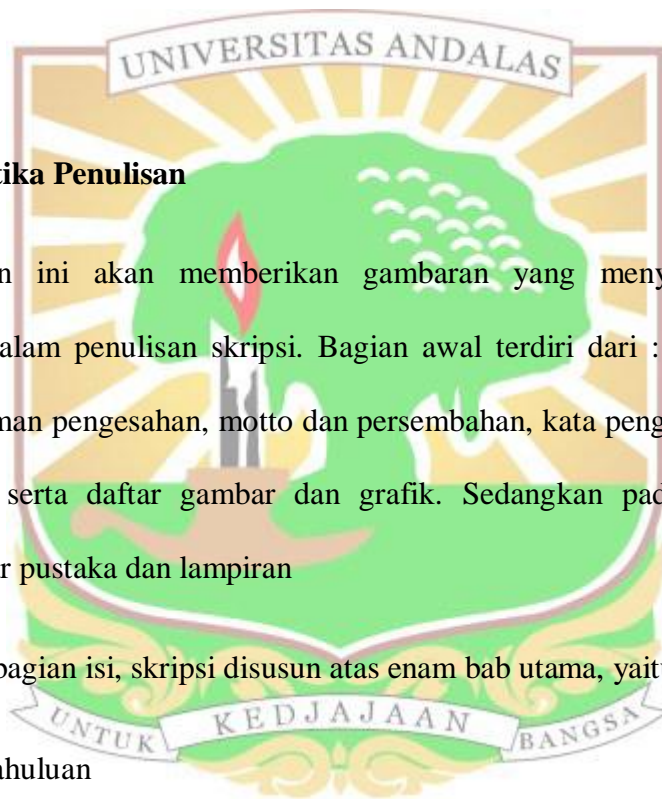
#### 1.6. Sistematika Penulisan

Bagian ini akan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang sistematika dalam penulisan skripsi. Bagian awal terdiri dari : halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, serta daftar gambar dan grafik. Sedangkan pada bagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran

Pada bagian isi, skripsi disusun atas enam bab utama, yaitu :

**BAB I : Pendahuluan**

Pendahuluan terdiri dari enam sub bab yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan





**BAB II : Landasan Teori**

Di dalam bab ini dibahas tentang teori-teori dan literature pendukung yang berkaitan dengan hubungan variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah pada sembilan sektor ekonomi. Selain itu juga dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian akan disusun suatu hipotesa yang menjadi jawaban sementara atas rumusan masalah

**BAB III : Metode Penelitian**

Bagian ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi daerah penelitian, data dan sumber data, metode analisis dan uji data yang terdiri dari uji asumsi klasik, uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji signifikansi parsial (uji t), uji signifikansi umum ( uji F) dan uji koefisien determinasi ( uji  $R^2$  ) .

**BAB IV : Gambaran Umum Penelitian**

Pada bab ini dijelaskan mengenai kondisi geografis dan perekonomian daerah kota Bukittinggi.

**BAB V : Hasil Pembahasan**

Pada bagian ini dibahas hasil penelitian dan analisa yang telah didapatkan dari hasil pengolahan data. Penjelasan hasil dimulai dari hasil uji asumsi klasik, uji normalitas, uji autokorelasi, uji

heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji signifikansi parsial (uji t), uji signifikansi umum ( uji F) dan uji koefisien determinasi ( uji  $R^2$ ) .

## BAB VI : Penutup

Bagian akhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang diperoleh dari pengolahan data

